

BAB III

TATA KELOLA PEMERINTAH DESA JUMO KABUPATEN

TEMANGGUNG

Dalam bab tiga ini penulis akan mendiskripsikan gambaran umum desa jumo dan tata kelola pemerintah desa. Dan untuk tata kelola pemerintah desa penulis mendiskripsikan tugas dan fungsi lembaga- lembaga pemerintahan, serta lembaga masyarakat yang bersifat formal maupun non- formal.

3.1 Kondisi Geografi dan Kondisi Demografi Desa Jumo Kabupaten

Temanggung

3.1.1 Kondisi Geografi

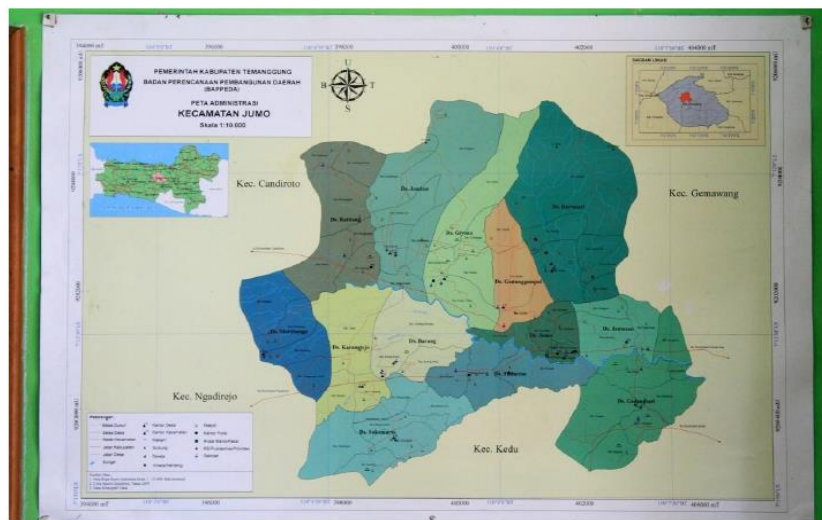
Sebagai gambaran kondisi wilayah di Desa Jumo, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung, maka perlu kiranya penulis laporkan keadaan Desa dari beberapa aspek kehidupan.

Desa Jumo merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung. Desa Morobongo mempunyai luas 196,744 Ha. Ketinggian Desa ini adalah 68 m diatas permukaan laut sehingga termasuk dataran tinggi dengan bentang wilayah yang berbukit serta curah hujan yang cukup tinggi

Jarak pemerintahan Desa menuju ibu kota Kabupaten adalah 20 km, sedangkan jarak pusat pemerintahan Desa menuju ibukota propinsi adalah 103 km

Gambar 3.1

Peta Kecamatan Jumo



Sumber : Laporan Pembangunan Desa Jumo 2017

Adapun batas-batas Desa Jumo Adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Gunung Gempol, Desa Giyono, dan Desa Kertosari

Sebelah Selatan : Desa Gedongsari

Sebelah Timur : Desa Jamusan

Seblah Barat : Desa Padureso

Desa Jumo terbagi menjadi delapan dusun yaitu, yakni Dusun Betonan, Dusun Kauman, Dusun Soroditan, Dusun Jagalan, Dusun Bongos, Dusun Bayongan, Dusun Godegan, dan Dusun Kebondalem. Yang terbagi kedalam 3 (tiga) RW (Rukun Warga)

Peruntukan lahan menurut Jenisnya di Desa Jumo adalah 109 , 66 ha untuk lahan sawah dan 71,98 ha untuk lahan bukan sawah. Untuk mengetahui dengan jelas jumlah tanah di Desa Jumo, dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 3.1

Jumlah Tanah Menurut Jenisnya

Jenis	Jumlah Hektare (ha)
Sawah	105,752
Tegal	51,1
Pekarangan	22,594
Hutan Negara	0,29
Lain- lain	14,01
Jumlah	196,744

(Sumber : Laporan Pertanggung Jawaban Pembangunan Desa Jumo 2017).

3.1.2 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Desa Jumo seluruhnya 2264 jiwa, yang terdiri dari perempuan 1157 jiwa dan laki-laki 1107 jiwa. Dan jumlah kepala keluarga adalah 592 KK.

Tabel 3.2.

Jumlah Penduduk Desa Jumo Berdasarkan Kelompok Umur

Kategori Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4 tahun	70	65	135
5-9 tahun	86	69	155
10-14 tahun	84	82	166
15-19 tahun	82	102	184
20-24 tahun	84	83	184
25-29 tahun	84	83	167
30-34 tahun	77	85	162
35-39 tahun	76	75	151
40-44 tahun	75	82	157
45-49 tahun	72	76	148
50-54 tahun	81	110	191
55-59 tahun	88	89	177
60-64 tahun	80	82	162
65-69 tahun	60	68	128
70-74 tahun	34	33	67
>=75 tahun	40	37	77
JUMLAH	1107	1157	2264

(Sumber : BPS Kabupaten Temanggung tahun 2017)

Desa Jumo dihuni oleh masyarakat yang heterogen, karena hampir semua agama ada di desa Jumo, namun tidak mencerminkan adanya konflik horizontal karena di antar warga desa Jumo saling menghargai satu sama lain, hal ini karena warga Jumo memiliki keragaman budaya yang kompleks

Penduduk Desa Jumo mayoritas Beragama Islam. Selain itu Kristen Katolik, Kristen Protestan, dan Buddha menjadi agama minoritas penduduk desa Jumo. Untuk mengetahui dengan jelas jumlah pemeluk agama di Desa Jumo, dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 3.3

Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Jumlah (jiwa)
1	Islam	1981
2	Kristen Katolik	11
3	Kristen Protestan	140
4	Buddha	127
Jumlah		2259

(Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban Pembangunan Desa Jumo 2017)

Desa Jumo mempunyai banyak sekali tempat ibadah yang tidak hanya dimiliki agama mayoritas seperti masjid dan surau, tapi juga memiliki tempat ibadah lain.

Desa Jumo mempunyai beberapa tempat ibadah dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4

Jumlah Tempat Ibadah

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	4
2	Surau	18
3	Gereja Protestan	1
4	Vihara	2
Jumlah		25

(Sumber : BPS Kabupaten Temanggung tahun 2017)

Masyarakat muslim di Desa Keseneng mayoritas adalah Warga Nahdatul Ulama (NU) . Serta mayoritas masyarakat desa Jumo dipengaruhi oleh tradisi dengan Corak budaya Islam dan Jawa yang lekat dengan tradisi yasinan, tahlilan, dan selamatan.

Yasinan adalah pembacaan surat Yasin secara bersama- sama yang dipimpin oleh kiai atau guru yang dilakukan di masjid atau tempat lain dan pada umumnya dilakukan pada Hari Kamis. Yasinan hampir mirip dengan tahlilan, akan tetapi biasanya kegiatan tahlilan dilakukan pasca ada prosesi kematian warga. Selamatan hampir sama dengan kegiatan Yasinan atau tahlilan, hanya saja selamatan dilakukan untuk memperingati hari atau peristiwa tertentu

Selain itu Desa Jumo juga memiliki penduduk dengan tingkat pendidikan yang berbeda beda, dengan mayoritas penduduknya masih tamat SD. Berikut adalah tabel yang menjelaskan rincian jumlah penduduk menurut pendidikan.

Tabel 3.5

Jumlah Penduduk menurut strata Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (jiwa)
(1)	(2)	(3)
1	Tamat Perguruan Tinggi/ Universitas	104
2	Tamat Akademi	51
3	Tamat SLTA/ Sederajat	367
(1)	(2)	(3)

4	Tamat SLTP/ Sederajat	269
5	Tamat SD/ Sederajat	416
6	Tidak Tamat SD	468
7	Belum Tamat SD/ MI	394
8	Belum Sekolah	190
Jumlah		2259

(Sumber : : Laporan Pertanggung Jawaban Pembangunan Desa Jumo 2017)

Sebagian besar penduduk di Desa Jumo mempunyai mata pencaharian di berbagai bidang yang mana tercatat sebanyak 1504 orang, dengan profesi pertambangan/ penggalian sebanyak 327 orang yang menduduki peringkat pertama. Kemudian di profesi peringkat kedua adalah pertanian sebanyak 323 orang. Profesi dengan jumlah penduduk tertinggi ketiga adalah pedagang, yaitu sebanyak 258 orang. Peringkat keempat diduduki oleh usaha jasa sebanyak 206 orang. Untuk jumlah sisanya bekerja pada profesi lain seperti industri rumah tangga, karyawan swasta, PNS, dan sebagainya. Untuk mengetahui dengan jelas jumlah mata pencaharian penduduk di Desa Jumo, dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 3.6

Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Jumo

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (orang)
1	Petani Tanaman Pangan	323
2	Peternak	15
3	Petani Perkebunan	41
4	Pertambangan/ Penggalian	327
5	Industri Pengolahan	112
6	Bangunan	89
7	Perdagangan	258
8	Pengangkutan & Komunikasi	53
9	Bank & Lembaga Keuangan Lainnya	8
10	Jasa- jasa	206
11	Lainnya	72
Jumlah		1504

(Laporan Pertanggung Jawaban Pembangunan Desa Jumo 2017)

3.2 Sosiologi Desa

Masyarakat Desa adalah kelompok masyarakat yang memiliki hubungan yang lebih mendalam dan erat dan sistem kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan. Sebagian besar warga masyarakat hidup dari pertanian. Masyarakat tersebut homogen, seperti dalam hal mata pencaharian, agama, adat-istiadat dan sebagainya. Dengan kata lain masyarakat pedesaan identik dengan istilah gotong royong yang merupakan kerja sama untuk mencapai kepentingan-kepentingan mereka. (Rahardjo, 1999).

3.2.1 Karakteristik Masyarakat Desa Jumo

Masyarakat desa selalu memiliki ciri-ciri atau dalam hidup bermasyarakat, biasanya tampak dalam perilaku keseharian mereka. Di Desa Jumo sendiri masyarakat desa norma dan tatanan sosial yang berlaku bercorak khas Jawa tengah yang dalam hubungan masyarakat saling menghormati antar sesama warga.

Masyarakat Desa Jumo juga memiliki perasaan batin yang sangat kuat antar sesama, khususnya perasaan yang kuat antar waga di masing- masing dusun di desa Jumo.

“...kalau di Dusun itu apapun yang dibahas mesti rame mas, kalau semisal di desa ada acara atau mau minta sumbangan dari dusun kaya iuran gitu malah warga mesti wegah mas, kadang malah sampai harga diri dusun dibawa- bawa, contohnya kalau ada pertandingan antar dusun gitu...”

Perasaan antar anggota masyarakat dusun yang amat kuat pada hakekatnya bahwa seseorang warga dusun merasa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dusun itu sendiri dimanapun ia hidup dicintainya serta mempunyai perasaan bersedia untuk berkorban setiap waktu demi masyarakatnya atau anggota-anggota masyarakat, karena beranggapan sama-sama sebagai masyarakat yang saling mencintai saling menghormati, mempunyai hak tanggung jawab yang sama terhadap keselamatan dan kebahagiaan bersama di dalam masyarakat.

Menurut Rahardjo (1999) ciri- ciri masyarakat pedesaan antara lain; *pertama*, di dalam masyarakat pedesaan di antara warganya mempunyai hubungan yang lebih mendalam dan erat bila dibandingkan dengan masyarakat pedesaan lainnya di luar batas wilayahnya. *Kedua*, sistem kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar

kekeluargaan. *Ketiga*, sebagian besar warga masyarakat pedesaan hidup dari pertanian. *Keempat*, masyarakat tersebut homogen, seperti dalam hal mata pencaharian, agama, adat istiadat, dan sebagainya.

Menjelaskan ciri masyarakat di desa Jumo menurut Rahardjo tersebut. *Pertama*, di desa Jumo hubungan masyarakat mempunyai hubungan yang sangat erat antar warga dusun, untuk hubungan antar warga desa dinilai kurang erat. Contohnya sidang Syuro hal ini dilakukan di tiap- tiap dusun rutin setiap tahun. *Kedua*, Mayoritas Penduduk Desa Jumo adalah warga asli bukan pendatang, bisa dikatakan bahwa hubungan yang terjalin antar warga adalah hubungan kekeluargaan, walaupun sudah banyak pendatang baru, di desa Jumo sendiri pendatang harus bisa menyesuaikan dengan budaya masyarakat di desa Jumo. *Ketiga*, Mayoritas mata pencaharian penduduk di desa Jumo adalah Petani dan Buruh bangunan. *Keempat*, Masyarakat desa Jumo secara tradisi adalah homogen, namun untuk agama masyarakat desa Jumo memeluk agama yang heterogen walaupun masih didominasi oleh agama Islam. Contoh dari tradisi masyarakat desa Jumo adalah Sidang Syuro, Grebeg Maulidan, dan Grebeg Syuro.

Menurut Ferdinand Tonnies (1887) masyarakat adalah karya ciptaan manusia itu sendiri. Hal ini ditegaskan oleh Tonnies dalam kata pembukaan bukunya. Masyarakat bukan organisme yang dihasilkan oleh proses-proses biologis. Juga bukan mekanisme yang terdiri dari bagian-bagian individual yang masing-masing berdiri sendiri, sedang mereka didorong oleh naluri-naluri spontan yang bersifat menentukan bagi manusia. Melainkan masyarakat adalah usaha manusia untuk memelihara relasi-relasi timbal balik.

Ferdinand Tonnies (1887) membagi ke dalam dua jenis kelompok, yaitu *gemeinschaft* dan *gesellschaft*:

1. *Gemeinschaft* (Paguyuban).

Kelompok sosial ini digambarkan sebagai kehidupan bersama yang intim dan pribadi, yang merupakan suatu keterikatan yang dibawa sejak lahir. Ikatan pernikahan dan keluarga digambarkan sebagai *gemeinschaft of life*. Contohnya kehidupan rumah tangga, kekerabatan, dan sebagainya. *Gemeinschaft* dibagi atas tiga tipe, yaitu *gemeinschaft by blood*, *gemeinschaft of place*, dan *gemeinschaft of mind*.

- a. *Gemeinschaft by blood* adalah paguyuban yang mengacu pada kekerabatan, atau di dasarkan pada ikatan darah atau keturunan. Di Desa Jumo sendiri hubungan kekerabatan yang didasarkan pada ikatan adalah Keluarga atau Trah
- b. *Gemeinschaft of place* adalah paguyuban yang mengacu pada kedekatan tempat, sehingga dapat saling bekerja sama dan tolong-menolong. Di Jumo sendiri adalah kelompok masyarakat dusun.
- c. *Gemeinschaft of mind* adalah paguyuban yang mengacu pada hubungan persahabatan karena persamaan minat, hobi, profesi, atau keyakinan. Di desa Jumo contohnya adalah Kelompok Yasin, kelompok tani, Kelompok Pemuda

2. *Gesellschaft* (Patembayan)

Gesellschaft adalah ikatan lahir yang bersifat pokok untuk jangka waktu yang pendek, bersifat sebagai suatu Bentuk dalam pikiran belaka, dan strukturnya bersifat mekanis. Bentuk *gesellschaft* ini umumnya terdapat di dalam hubungan perjanjian yang didasarkan pada ikatan timbale balik,

Bentuk *geseelschaft* sangat berkaitan dengan solidaritas masyarakat. Solidaritas adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh sebuah masyarakat ataupun kelompok sosial karena pada dasarnya setiap masyarakat membutuhkan solidaritas. Johnson (1994) mengungkapkan solidaritas menunjuk pada suatu keadaan hubungan individu dan atau kelompok yang didasarkan pada keadaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Ikatan ini lebih mendasar daripada kontraktual yang dibuat atas persetujuan rasional.

Ritzer (2012) menjelaskan bahwa Emile Durkhiem membagi solidaritas kedalam dua bentuk. Yaitu Mekanik dan Organik. Berikut adalah pengertian dan penjelasan kondisi solidaritas di desa Jumo.

a. Solidaritas mekanik

Solidaritas yang didasarkan pada suatu kesadaran kolektif yang menunjuk kepada totalitas kepercayaan- kepercayaan yang rata rata pada masyarakat yang sama, yaitu mempunyai pekerjaan yang sama pengalaman yang sama sehingga banyak pula norma-norma yang dianut bersama. Melalui solidaritas mekanik masyarakat di Desa Jumo dapat ikut dalam Sidang Syuro dan tentu ikut terlibat dalam upaya pembangunan di tingkat dusun sesuai kesepakatan bersama warga dusun, karena setiap warga dusun di Jumo mempunyai kesamaan rasa dan karena satu kepercayaan bahwa Bulan Syuro adalah waktu yang baik untuk merumuskan kegiatan di tingkat dusun. Tentunya berkumpulnya warga di sidang Syuro tidak didasarkan karena kebutuhan ekonomi, karena para warga yang berkumpul tidak mendapatkan imbalan. Mereka datang karena perasaan dan kepercayaan yang diyakini warga dusun di desa Jumo.

b. Solidaritas Organik

Johnson (1994) mengemukakan bahwa solidaritas organik muncul karena pembagian kerja bertambah besar. Solidaritas itu didasarkan pada tingkat saling ketergantungan yang tinggi. Saling ketergantungan itu bertambah sebagai hasil dari bertambahnya spesialisasi dan pembagian pekerjaan yang memungkinkan dan juga bertambahnya perbedaan dikalangan individu.

Solidaritas organik muncul karena pembagian kerja yang ada pada masyarakat sederhana semakin bertambah. Hal ini terjadi karena perubahan dunia kerja modern yang identik dengan pembagian kerja yang mengambil peran dari kesadaran kolektif. Pembagian kerja yang awalnya dimainkan oleh kesadaran kolektif bersama menjadi hubungan kontraktual dalam masyarakat.

Didesa Jumo Solidaritas Organik yang berkaitan dengan pembagian kerja menggeser kesadaran kolektif mulai ada, contohnya adalah adanya Dana Desa yang besar yang ikut membuka lapangan kerja baru di desa Jumo. Hal ini sangat berkaitan dengan nilai dari modal sosial yang sudah tergerus dengan adanya Dana Desa. Bapak Kepala kampung Bondalem Mengatakan :

“... dana desa kan besar mas, kalau dulu sebelum ada nya dana desa masyarakat gotong royongnya bagus, namun karena sekarang Tukang aja sudah diitung di perencanaan proyek ya jadi warga kalau ada tukang males bantu karena mereka digaji, padahal ya tukangnya warga desa sini...”

Walaupun memang tidak sepenuhnya Solidaritas Mekanik tergantikan dengan solidaritas Organik, namun berkaitan dengan nilai modal sosial dari kesadaran Mekanik dengan adanya dana desa yang tujuannya utamanya untuk perbaikan infrastruktur. Penulis beranggapan modal sosial mulai tergeser oleh modal ekonomi dengan adanya Dana Desa

3.3 Tata kelola Pemerintahan desa Jumo

Tata kelola desa (village governance) adalah paradigma yang baru dalam tata kelola pemerintahan. Istilah governance tidak sama dengan governant (pemerintah) dalam arti sebagai lembaga, tetapi governance adalah proses pemerintahan yang mempunyai arti luas. Jon Pierre dan Guy Peters memahami governance sebagai sebuah konsep yang berada dalam konteks hubungan antara sistem politik dan lingkungannya.

Good Governance dalam lingkup desa, ada dua isu yang perlu diperhatikan. Pertama, isu pemerintahan demokratis (democratic governance), yaitu pemerintah desa yang berasal “dari” (partisipasi) masyarakat; dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk masyarakat. Kedua, hubungan antar elemen governance di desa yang didasarkan pada prinsip kesajajaran, keseimbangan dan kepercayaan (trust). Kedua isu tersebut jika terjadi keselarasan maka akan menciptakan kebaikan bersama (common good) antara pemerintah, swasta dan masyarakat

Menurut AAGN Dwipayana dan Sutoro Eko (2003) Pemetaan Governance di desa terdiri dari empat elemen; negara (pemerintah desa). Masyarakat politik (Badan Permusyawaratan Desa), masyarakat sipil (organisasi masyarakat, institusi lokal dan warga masyarakat), serta masyarakat ekonomi (arena produksi dan distribusi yang dilakukan oleh pelaku dan organisasi ekonomi desa. Dan berikut adalah elemen elemen pemetaan governance di desa :

A. Negara

Negara (Pemerintah) adalah lembaga yang menjadi *Leading Sector* untuk membuat regulasi (kebijakan) yang tegas guna mengarahkan pembangunan desa yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Regulasi tersebut harus dibuat dan diputuskan dengan mempertimbangkan kebutuhan dari elemen elemen yang lain seperti Badan Permusyawaratan Desa, Kelompok Masyarakat maupun Swasta. Dalam menjalankan fungsinya pemerintah desa harus mampu menjalankan prinsip akuntabilitas, transparansi, responsivitas dan kapasitas.

Di desa Jumo Sendiri pemerintah desa adalah Kepala Desa dan perangkat-perangkat desa yang bertugas membantu Kepala desa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai peraturan yang berlaku, dan Kepala Desa juga harus mampu memenuhi visi- misi desa Jumo.

Menurut Undang- Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa Pemerintahan desa dijalankan oleh Kepala Desa. Kepala Desa dipilih melalui Pemilihan umum. Untuk menjalankan beberapa tugas dan fungsi Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa atau disebut dengan nama lain. Kepala desa mempunyai tugas untuk Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

A. Visi dan Misi Desa Jumo

1. Visi Desa

Seluruh Masyarakat Desa Jumo mengharapkan selama kurun waktu 6 (enam) tahun 2014- 2019 mempunyai desa yang sejahtera dengan menyatukan seluruh komponen masyarakat dalam berkarya menggerakkan potensi desa yang ada. Oleh

karena itu dirumuskan visi dan misi dalam rencana Pembangunan desa Jangka Menengah tahun 2014- 2019 yakni : “ Desa Jumo yang agraris berwawasan lingkungan, memiliki masyarakat agamis, berbudaya dan sejahtera dengan Pemerintahan yang Bersih”

Visi ini mengandung makna bahwa :

1. Desa yang “Agraris berwawasan lingkungan” adalah suatu desa yang secara ekonomi masyarakat bertumpu pada sektor pertanian sebagai penggerak utama perekonomian desa dan tumpuan kehidupan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan peningkatan kualitas lingkungan hidup
2. “ Agamis” adalah suatu kondisi dimana dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat terpenuhinya kebutuhan jasmani masyarakat Desa, juga terpenuhinya kebutuhan rohani dengan sikap dan akhlak mulia yang sesuai dengan pemahaman, penghayatan ajaran agama dan didukung kebebasan menjalankan ajaran agama serta toleransi antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan norma- norma agama.
3. “Berbudaya” adalah suatu kondisi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan memiliki budaya sehat, budaya peduli pendidikan, budaya kebersihan lingkungan tempat tinggal dan lingkungan perumahan dan budaya peduli atas lingkungan sosial kemasyarakatan dan kebudayaan yang berkembang di masyarakat.

4. “Sejahtera” adalah tercukupinya kebutuhan pokok lahiriah dan batiniah bagi masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan ekonomi masyarakat desa yang layak dan bermartabat karena terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan,
5. “Pemerintahan yang bersih” adalah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sesuai dengan arah pelaksanaan reformasi birokrasi.

2. Misi Desa

Dalam mewujudkan visi Desa Jumo yang agraris berwawasan lingkungan, memiliki masyarakat agamis, berbudaya dan sejahtera dengan pemerintahan yang bersih maka langkah- langkah atau upaya yang akan dilaksanakan dirumuskan dalam 8 Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya dan sejahtera
2. Mewujudkan peningkatan Infrastruksur permukiman yang layak yang berwawasan lingkungan
3. Mewujudkan peningkatan pendidikan yang berkualitas tanpa meninggalkan kearifan lokal
4. Mewujudkan peningkatan ketersediaan saran dan prasarana dasar
5. Mewujudkan pertanian modern yang berwawasan lingkungan
6. Mewujudkan peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang bersih, transparan , tidak KKN dan berorientasi pada pelayanan publik

7. Mewujudkan peningkatan budaya sehat
8. Mewujudkan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa

B. Strategi dan kebijakan

1. Strategi

Strategi yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pembangunan tingkat dusun dengan pelibatan swadaya masyarakat
- b. Mengoptimalkan peran lembaga kemasyarakatan desa dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat

2. Kebijakan

Dalam melaksanakan beberapa strategi diatas maka kebijakan pemerintah desa jumo adalah sebagai berikut:

1. Melalui strategi meningkatkan perekonomian desa dengan pertanian yang memberdayakan ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan desa yang berwawasan lingkungan maka kebijakan yang dirumuskan adalah meningkatkan sarana prasarana pertanian dan memaksimalkan kelompok masyarakat yang sudah ada.
2. Melalui strategi meningkatkan kualitas iman dan taqwa melalui pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama maka

kebijakan yang dirumuskan adalah meningkatkan sarana dan prasarana peribadatan secara merata serta pembinaan kegiatan keagamaan

3. Melalui strategi meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dengan menggerakkan dan menumbuhkembangkan swadaya dan gotong- royong masyarakat dalam pembangunan desa maka kebijakan yang dirumuskan adalah meningkatkan komunikasi antara lembaga dan masyarakat
4. Melalui strategi meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar maka kebijakan yang dirumuskan adalah meningkatkan sarana prasarana pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan sosial budaya tanpa meninggalkan kearifan lokal.
5. Melalui strategi meningkatkan pelayanan masyarakat dengan pemerintahan yang bersih, transparan, tidak KKN dan berorientasi pada pelayanan publik maka kebijakan yang dirumuskan adalah meningkatkan kinerja aparat Pemerintah Desa

C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Rincian Anggaran pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari :

Tabel 3.6

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

1.	Pendapatan Desa	Rp. 2.113.473.105
2.	Belanja Desa	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 1.398.828.500
	b. Bidang Pembangunan	Rp. 674.339.000
	c. Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp. 35.899.106
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 5.000.000
	Jumlah Belanja	Rp. 2.114.066.606
	Surplus/ Defisit	Rp. (593.500)
3.	Pembiayaan Desa	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 593.500
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0
	Selisih Pembiayaan	Rp. 593.500

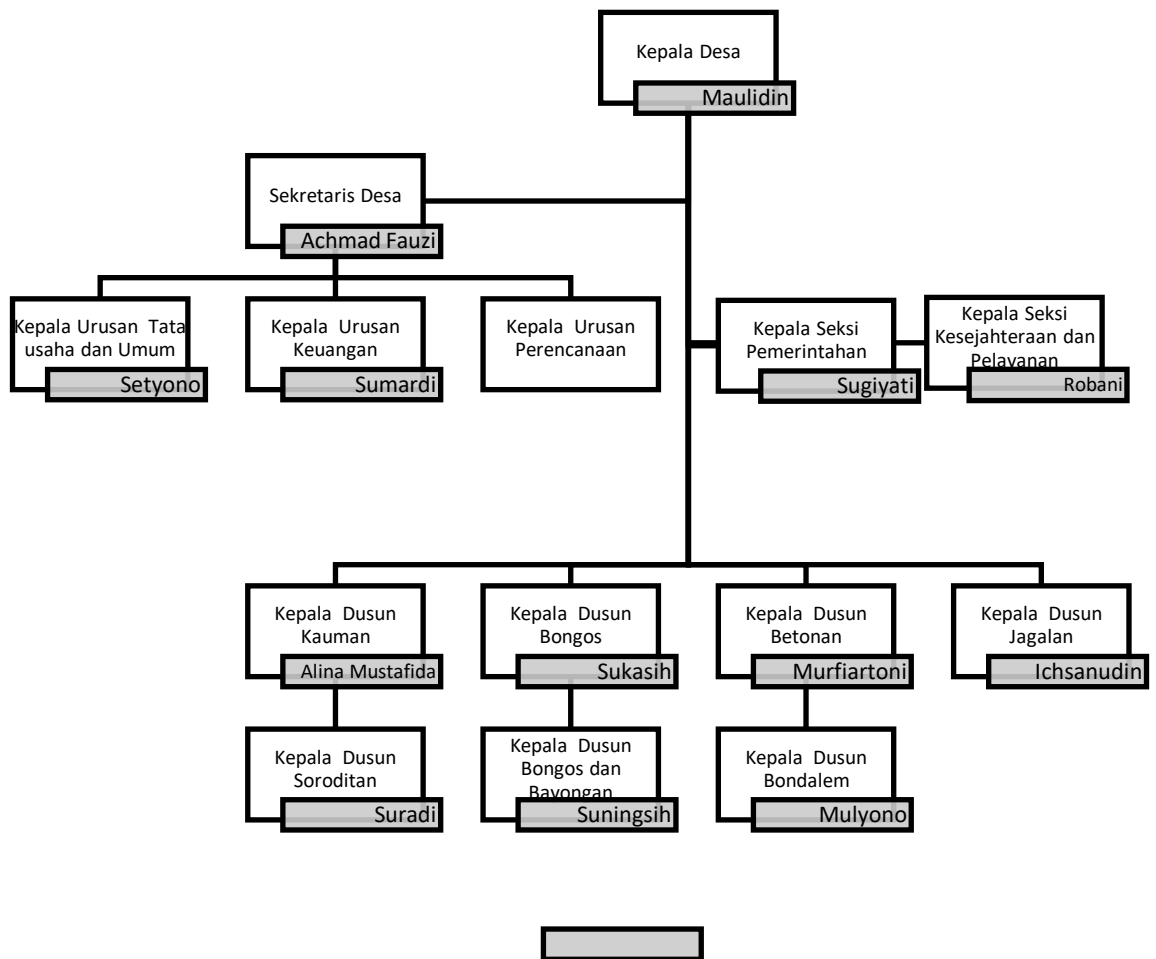
Sumber : Laporan Pertanggung Jawaban Pemerintah Desa Jumo tahun 2017

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Temanggung no.1 tahun 2007 tentang pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa, Kabupaten Temanggung bahwa pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meliputi Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Pemerintahan,

Perencanaan, Kesra, Keuangan, dan Umum) dan Kepala Dusun. Berikut adalah Struktur Lembaga Pemerintah Desa Jumo Kabupaten Temanggung:

Gambar 3.3

Struktur Pemerintah Desa Jumo Kabupaten Temanggung



(Sumber : Lampiran Peraturan Desa Jumo nomor 4 Tahun 2017)

B. Masyarakat Politik

Setelah reformasi, desentralisasi tidak hanya sampai ke daerah namun juga terbawa sampai ke desa. Lembaga pemerintah desa dianggap terlalu *super power*, sehingga perlu dibentuknya lembaga formal yang bernama Badan Permusyawaratan desa (BPD). Fungsinya adalah untuk melakukan kontrol, monitoring dan evaluasi sehingga menciptakan mekanisme *check and Balances*.

Menurut pasal 56 Ayat 1 Undang- Undang no 6 tahun 2014 tentang Desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Sebagai lembaga keterwakilan masyarakat yang ada di desa. Sesuai Undang-Undang no 6 tahun 2014 BPD memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa
- c. melakukan pengawasan kinerja kepala Desa.

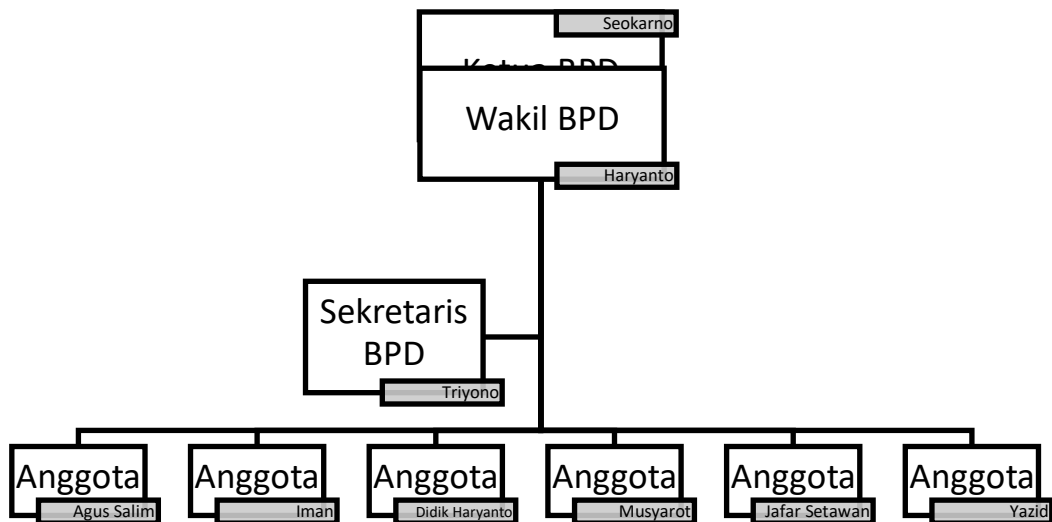
Berhasil tidaknya Pembangunan Desa, termasuk kinerja Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan perlu didukung oleh masyarakat itu sendiri. Model pembangunan terpaku dan terpusat oleh lembaga formil sudah usang dan hanya melahirkan hubungan penguasa dengan rakyat.

Dalam Melakukan Program – Program Pembangunan Desa pemerintah Program-program pembangunan senantiasa diawali dengan adanya Musyawarah

Pembangunan Desa (Musbangdes) untuk merencanakan program pembangunan yang berasal dari aspirasi masyarakat melalui RT, RW, BPD, dan LKMD sehingga akan meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Desa. Program-program pembangunan ini dituangkan dalam Rencana Tahunan Pembangunan Desa (RTPD) dengan menganut skala prioritas.

Gambar 3.4

Struktur Badan Permusyawaratan Desa di Desa Jumo Temanggung



Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban Desa Jumo 2018

Berhasil tidaknya Pembangunan Desa, termasuk kinerja Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan perlu didukung oleh masyarakat itu sendiri. Model

pembangunan terpaku dan terpusat oleh lembaga formil sudah usang dan hanya melahirkan hubungan penguasa dengan rakyat jelata.

C. Masyarakat Sipil

Masyarakat sipil banyak berkembang di desa bahkan sebelum adanya peraturan tentang otonomi Desa, sebagian besar dibentuk oleh pemerintah, sebagian lagi menjadi perpanjangan tangan masyarakat yang terbentuk dari masyarakat itu sendiri. Kaum akademisi dan pilar-pilar masyarakat sipil seperti tokoh masyarakat juga ikut andil dalam upaya memberikan kontribusi *influencer* dalam tatanan demokrasi di desa itu sendiri.

Pada masyarakat desa, karakter masyarakat sipil dapat dilihat melalui organisasi- organisasi desa baik formal maupun informal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, modal sosial (norma, tradisi, jaringan sosial dan nilai lokal lainnya,) gaya kepemimpinan serta mekanisme pengelolaan konflik. Organisasi lokal muncul sebagai asosiasi bersama yang berbasiskan agama, okupasi, kegemaran atau aktivitas tertentu seperti tradisi. Keempat elemen dalam masyarakat sipil inilah yang mempengaruhi pola partisipasi masyarakat, baik dalam ranah ekonomi- sosial maupun kehidupan politik negara.

Masyarakat Sipil Dibedakan dalam dua katagori yaitu koopratis dan partisipatif . Organisasi Koopratis dibentuk oleh pemerintah dan aktivitasnya lebih banyak berjalan dibawah kontrol pemerintah. Sedangkan organisasi partisipatif dibentuk atas inisiatif masyarakat dan pengelolaanya berbasiskan partisipatif anggotanya.

Dan berikut adalah tabel dari lembaga atau kelompok masyarakat yang ada di Desa Jumo

Tabel 3.8

Lembaga dan Kelompok Masyarakat di Desa Jumo

		Basis	
		Korporatis	Partisipatif
Bentuk	Formal	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Satuah Tugas Pelindungan Masyarakat (Hansip), Rukun Tetangga/ Rukun Warga (RT/RW)	Badan Perwakilan Desa (BPD)
	Informal	Kelompok Yasin, Kelompok Tani	Sidang Syuro Desa Jumo,

Sumber :Membangun Good Governance dari Desa, RIIE Institute

lembaga formal- korporatis yang dibentuk oleh Pemerintah Desa Jumo adalah jenis lembaga kemasyarakatan desa. Menurut Peraturan Daerah no 1 tahun 2007

Lembaga Kemasyarakatan dimaksudkan sebagai wadah untuk menampung prakarsa, partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan, pemberdayaan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga, peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat serta pemberdayaan hak politik masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan untuk pendanaan dari Lembaga Masyarakat Desa yang bersifat formal di desa Jumo berasal dari swadaya anggota, Anggaran pendapatan dan Belanja Desa, bantuan dari pemerintah daerah serta bantuan yang tidak mengikat. Sehingga bentuk dari Lembaga masyarakat ini bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Sementara, untuk lembaga nonformal masyarakat yang ada di desa Jumo merupakan lembaga yang tidak dibentuk oleh pemerintah desa atau melalui peraturan yang berlaku, namun terbentuk dari masyarakat itu sendiri. Serta tidak ada hubungan yang mengikat dengan pemerintah desa. Contoh dari kelompok korporatis informal adalah kelompok. Ada sekitar 3 Kelompok tani yang ada di desa Jumo, yang terletak di dusun Bondalem, Betonan dan Bongos. Sementara kelompok partisipatif informal yang ada di desa Jumo adalah Sidang Syuro. Dan untuk pendanaan berasal dari swadaya masyarakat dan bantuan dari pihak luar yang tidak mengikat.

D. Masyarakat Ekonomi

Good Governance di dalam konteks otonomi desa menaruh perhatian terhadap bekerja sistem ekonomi karena tujuan akhir good governance adalah mewujudkan

keadilan sosial, dan itu tercermin dalam pengaturan sistem produksi dan distribusi atas barang dan jasa di masyarakat.

Desa Jumo merupakan pusat kegiatan perekonomian untuk wilayah kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung. Sehingga akan berdampak ke masyarakat desa Jumo dalam bidang perekonomian desa. Di desa Jumo sendiri produk unggulan UMKM adalah produk anyaman bambu namun pemasarannya tidak di desa jumo namun diluar daerah. Dari pemerintah desa Sendiri UMKM yang ada di Jumo diberdayakan melalui Badan Usaha Milik Desa dalam proses pemasaraannya.

Pola Hubungan antara elemen tata kelola pemerintahan di desa jumo, baik pemerintah desa, Badan Pemusyawaratan Desa, Lembaga Masyarakat Desa Formal maupun Informal serta swasta itu sendiri bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif sehingga tidak ada hubungan yang mengedepankan pihak yang kuat (*super power*).

Contoh dari hubungan antara elemen yang ada di desa Jumo adalah dengan melalui Musyawarah Desa (Musdes). Menurut UU nomor 6 tahun 2014 Musyawarah desa Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Di desa Jumo sendiri Musyawarah Desa partisipasi masyarakat sangat kurang, karena Masyarakat hanya terwakili aspirasinya melalui Kepala Dusun, Anggota BPD, maupun Ketua Kampung. di dalam Musdes menurut UU nomo 6 tahun 2014 membahas tentang penataan Desa, perencanaan Desakerja sama

Desa, rencana investasi yang masuk ke Desa, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, penambahan dan pelepasan Aset Desa dan kejadian luar biasa. Sementara hubungan antara setiap elemen di desa yang bersifat nonformal di desa jumo hanya bisa dilakukan di Sidang Syuro, karena sidang Syuro adalah tradisi yang diselenggarakan setahun sekali dengan mempertemukan kepala desa beserta perangkat desa, Ketua BPD atau anggota BPD, dan masyarakat kampung. Sidang Syuro diselenggarakan di tiap dusun yang ada di desa Jumo.

3.4 Dinamika Sosial dan Politik Desa Jumo

Manusia mempunyai naluri untuk hidup bersama dengan orang lain secara harmonis, setiap manusia mempunyai kebutuhan fisik maupun mental yang sukar dipenuhi seorang diri, maka ia akan bekerjasama untuk mencapainya, hal ini juga terjadi di masyarakat desa. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut masyarakat desa melakukan hubungan dan interaksi dengan orang lain dengan jalan mengorganisasikan kelompok dan asosiasi.

Kelompok maupun asosiasi seringkali menciptakan sebuah posisi atau kedudukan yang diperoleh dari dalam masyarakat itu sendiri. Di desa Jumo sendiri status dan kedudukan masih membedakan antara golongan priyayi dan wong cilik. Golongan priyayi di desa Jumo terdiri dari Perangkat desa, Kepala Desa, Ketua BPD, Anggota BPD, Tokoh masyarakat, dan Kaum Terpelajar seperti Guru. Orang Kecil/ wong cilik menjadi lapisan bawah, biasanya buruh tani, buruh bangunan, maupun pedagang kecil.

Hubungan antara Priyayi dan Wong cilik yang ada di Desa Jumo menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat desa muncul stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial ini dijaga dan dilestarikan dalam budaya musyawarah yang ada di desa. Budaya-budaya diantaranya pakaian, bahasa dan posisi seorang priyayi sewaktu jalannya musyawarah dusun seperti sidang syuro.

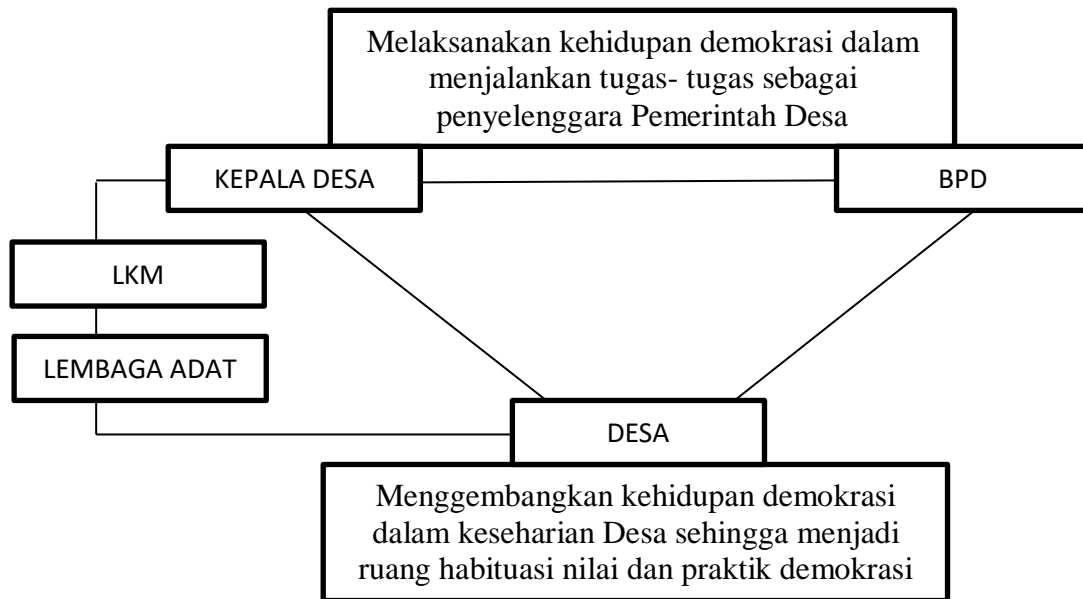
Stratifikasi sosial yang ada di desa Jumo menjadikan demokrasi yang dibangun di desa termasuk desa Jumo semakin kompleks. Kompleksitas yang terjadi di desa Jumo berjalan dalam dua arus. *Pertama*, arus struktur, yaitu prosedur dan mekanisme penetapan mengacu dalam Peraturan yang berlaku. *Kedua*, arus Kultur atau budaya, yaitu terkait pengenalan sistem politik modern yang dihadapkan dalam kehidupan sosial masyarakat desa yang masih tradisional. Walaupun pada dasarnya tidak ada perbedaan yang menonjol antara musyawarah non formal dengan musyawarah formal seperti Musrenbangdes di desa Jumo, namun partisipasi masyarakat di desa Jumo lebih tinggi di ranah non- formal daripada musyawarah formal.

3.4.1 Demokrasi di Desa Jumo

Sejak implementasi Undang – Undang no 6 tahun 2014 tentang Desa, akan menciptakan perubahan Struktur dan budaya tertentu di desa. Karena desa merupakan wilayah yang bercorak tradisional dengan segala praktek kehidupan masyarakat. Sehingga pembiasaan praktik dan nilai- nilai demokrasi terjadi karena bentuk penyesuaian antara demokrasi dan budaya. Berikut adalah bagan tentang kondisi demokrasi yang ada di desa.

Gambar 3.5

Hubungan antar aktor dalam budaya demokrasi di desa



Sumber : Demokratisasi Desa oleh Naeni Amanullah, Kementerian Desa, pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

Di desa Jumo sendiri menurut bagan diatas tiap aktor yang ada di desa memiliki peran masing- masing, Kepala Desa dan badan Permusyawaratan Desa memiliki kewajiban pengembangan demokrasi desa dan berkeadilan gender sesuai Undang-undang no 6 tahun 2014.

Dari pemerintah desa lewat Kepala Desa dan BPD untuk menciptakan keadilan gender, tidak terlihat karena corak dan budaya Jumo sendiri tentang gender cenderung Patriarki. Contohnya adalah dalam Musyawarah yang terjadi di lingkup dusun maupun desa, peran perempuan terwakili oleh laki- laki, mengutamakan laki- laki ketimbang perempuan. Artinya tidak ada komitmen yang berarti tentang

keadilan gender, walaupun peneliti tidak menemukan masalah dengan ketidakadilan gender yang terjadi di desa Jumo, hal ini dikarenakan budaya patriarki cenderung sudah mengakar di masyarakat desa Jumo.